

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam, DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2008.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptartha Jaya: Jakarta, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, Thomas and west group, 2004.
- C.J.N. Verstedden, *Indeiding Algemeen Bestuursrecht*. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1984.
- Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Carl J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy Theory and Practise in Europe and America*, Blaidell Publishing Company : Weldha. 1967.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Erliyn Indarti, *Diskresidan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP : Semarang, 2010.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008.

- Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghlmia Indonesia, Bogor, 2007.
- Guy Stessens, *Money Laundering A New International Law Enforcement Model*, Cambridge University Press, The Edinburg Building, Cambridge CB2 8 RU, UK, 2000.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, PustakaHarapan, Jakarta, 1993.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*, Nusamedia, Bandung, 2009.
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*. Bayu Media Publishing, Malang, 2004.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, 2008.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- Muladidan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Pathorang Hlmim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Jakarta, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.

- Philipus M. Hadjon dan Titiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2007.
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetak ketiga, UI Press, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1983.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2002.
- Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Hukum Progresif)*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015.

## **B. Jurnal Dan Makalah Hukum**

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justitia, Universitas Parahyangan Bandung, Edisi IV, Tahun 2000.

Biro Hukum Urusan Hukum dan Sekretariat Bank Indonesia, Makalah “*Money Laundering*”, Jakarta, 2010.

Maggie Regina Imbar, *Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No.1/Jan-Mar/2015.

Modul E-Learning 1 oleh Pusat Analisis Transaksi Keuangan tentang “Pendanaan Pencucian Uang dan Terorisme”.

Rusdianto, makalah, “*Teori Kewenangan (Theorie van Bevoegheid)*”, Makalah dibuat untuk memenuhi tugas kuliah di Magister Kenotariatan Universitas Narotama, 2012.

Sigit, Herman Binaji, “*Dualisme Pandangan Penuntutan TPPU*”, Mahkamah Agung RI Edisi 5, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI: Jakarta, 2014.

Yunus Husein, Makalah “*Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*”, Jakarta, 2004.

### C. Internet

Ade Aleandro, Berita “*Komisi Pemberantasan Korupsi Tidak Berwenang Melakukan Penuntutan Perkara Pidana Pencucian Uang*” [www.kompasiana.com/adealeandro/KPK-tidak-berwenang-melakukan-penuntutan-perkara-pidana-pencucian-uang\\_55281bd6f17e61c4188b458c](http://www.kompasiana.com/adealeandro/KPK-tidak-berwenang-melakukan-penuntutan-perkara-pidana-pencucian-uang_55281bd6f17e61c4188b458c).

<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1212-10-persoalan-di-draf-ruu-kpk>.

[www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f0d3968ed1f/grey-area-penangan-Tindak-Pidana-Pencucian-Uang-bagian-1](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f0d3968ed1f/grey-area-penangan-Tindak-Pidana-Pencucian-Uang-bagian-1).

### D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/JKT.PST atas nama M. Akil Mochtar.